



## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015-2019**

**Nuratika**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
E-mail : [nuratika090916@gmail.com](mailto:nuratika090916@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure of the Kuantan Regency Government in 2015-2019. This research is descriptive by using quantitative data analysis with a causal research design. The data used in this study is secondary data in the form of Budget Realization Reports, namely Realization of Regional Original Revenue (PAD), Realization of General Allocation Funds (DAU), Realization of Special Allocation Funds (DAK) and Realization of Capital Expenditures at the Regional Government of Kuantan Singingi Regency Office (BPKAD). Regional Asset Financial Management Agency 2015-2019. Data were collected using documentation and library methods. Data analysis was carried out using the Multiple Linear Regression method with the help of SPSS Version 25 software. In this study using 4 variables, the independent variables are Regional Original Income (PAD) (X1), General Allocation Fund (DAU) (X2), Special Allocation Fund (DAK) (X3), and Capital Expenditure (Y) as the dependent variable.*

*The results of this study indicate that partially Regional Original Income (PAD) has a positive and significant effect on the Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government by 72%, so that the Regional Original Income (PAD) increases and the Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government also increases. Likewise, the General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant effect on Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government by 60%, so the increase in the General Allocation Fund (DAU) will encourage large expenditures to finance activities, while the Special Allocation Fund (DAU) DAK) Also has a positive and significant effect on the Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government by 73% so that the Special Allocation Fund (DAK) helps finance and fund special activities. Simultaneously Local Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) to the Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government is 90.2%. So that the Capital Expenditure of the Kuantan Singingi Regency Government can be said to be good.*

**Keywords : Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure**



### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Tahun 2015-2019. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan Analisa data kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dinas (BPKAD) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Tahun 2015-2019. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS Versi 25. Dalam penelitian ini menggunakan 4 Variabel, Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_3$ ), dan Belanja Modal (Y) Sebagai Variabel dependennya.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 72%, Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pun Meningkatkan. begitu pun dengan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 60%, dengan Begitu Meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) Maka Akan mendorong Pengeluaran yang besar juga didalam membiayai kegiatan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 73% sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) membantu Keuangan dan mendai kegiatan bersifat khusus. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 90,2%. Sehingga Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan Baik.*

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal**

## **1. PENDAHULUAN**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja Langsung pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal. Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan. Mardiasmo (2018: 187) menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).



Sejalan dengan pembaharuan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kemudian diikuti dengan amandemen PP No. 105 Tahun 2000 menjadi PP No. 58 Tahun 2005, dan amandemen.

Kepmendagri No. 29 Tahun 2005 menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengalokasian sumber daya ke dalam Belanja Modal (*Capital Expenditures*) sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya, Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Mahmudi, 2016: 96). Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar tersendiri untuk pengenaan pajak dan retribusi daerah tergantung dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat. Realisasi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2019 ditunjukkan pada tabel laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran ( LRA ) PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019 (Dalam Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi PAD</b> | <b>Realisasi DAU</b> | <b>Realisasi DAK</b> | <b>Realisasi Belanja Modal</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2015         | 70.433.899.294.00    | 602.796.123.000.00   | 20.832.035.000.00    | 326.735.746.648.00             |
| 2016         | 62.176.252.836.44    | 600.665.068.000.00   | 140.640.934.323.00   | 178.016.363.176.00             |
| 2017         | 108.028.330.072.33   | 600.606.026.000.00   | 187.775.267.615.00   | 203.273.640.916.05             |
| 2018         | 77.084.865.913.66    | 618.561.583.000.00   | 204.519.811.402.00   | 196.801.855.381.60             |
| 2019         | 78.575.317.037.0     | 655.605.939.401.00   | 267.377.371.413.00   | 327.963.804.578.00             |

*Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, 2021*



Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa besarnya Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019 mengalami Penurunan dan Peningkatan. Pada Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 dengan Total Rp.178.016.363.176.00 dan mengalami peningkatan dana pada Tahun 2019 dengan Total Rp.327.963.804.578.00, hal ini disebabkan karena semakin tingginya DAU dan DAK Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terjadi pada tahun 2019. Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal Merupakan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan Khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2009).

Berdasarkan uraian di atas ada ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi untuk Menganalisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kuantan Singingi, Maka Peneliti Mengambil judul “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Periode 2015-2019* “.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan computer yang mulai dari pengumpulan dara, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, (Permendagri No 13 pasal 232,2006:76)

#### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim (2012:96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.



### **2.1.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2016: 96), yaitu :

### **2.1.2.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2018: 135).

### **2.1.2.4 Retribusi Daerah**

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam Akuntansi Keuangan Daerah (Darise, 2018:136) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **2.1.2.5 Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2012:98). Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut Darise (2018:136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **2.1.2.6 Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menerangkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Asing
5. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.



### 2.1.3 Dana Alokasi Umum

#### 2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

#### 2.1.3.2 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan (DJPk) terdiri atas tiga tahapan berikut :

- a. Tahapan Akademis  
Tahapan Akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.
- b. Tahapan Administratif  
Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas data kemuktahiran data yang digunakan.
- c. Tahapan Teknis  
Tahapan Teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK adalah sebagai berikut:

$$DAU=AD +CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

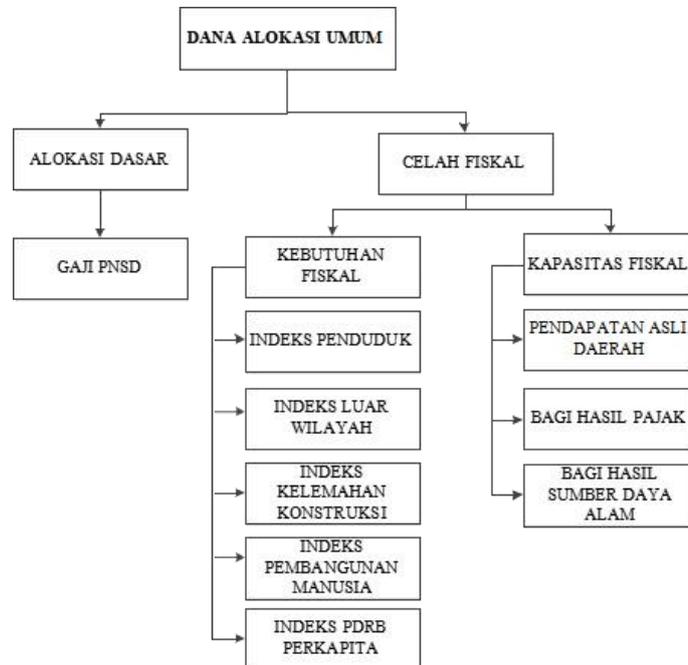
AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang menyusun Alokasi Dana Alokasi Umum.

**Gambar 2. 1**

Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

#### 2.1.4 Dana Alokasi Khusus

##### 2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Mardiasmo (2014:144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain.

##### 2.1.4.2 Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 145/PMLK.07/2013, dalam pengalokasian Dana Aloksi Khusus harus memenuhi kriteria umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus.
2. Penentuan besaran Alokasi Dana Alokasi khusus untuk masing-masing daerah.

#### 2.1.5. Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2012:101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Belanja



Modal menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

#### **2.1.5.1 Macam-Macam Belanja Modal**

Mahmudi (2019:74) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya.

#### **2.1.5.2 Peranan Belanja Modal**

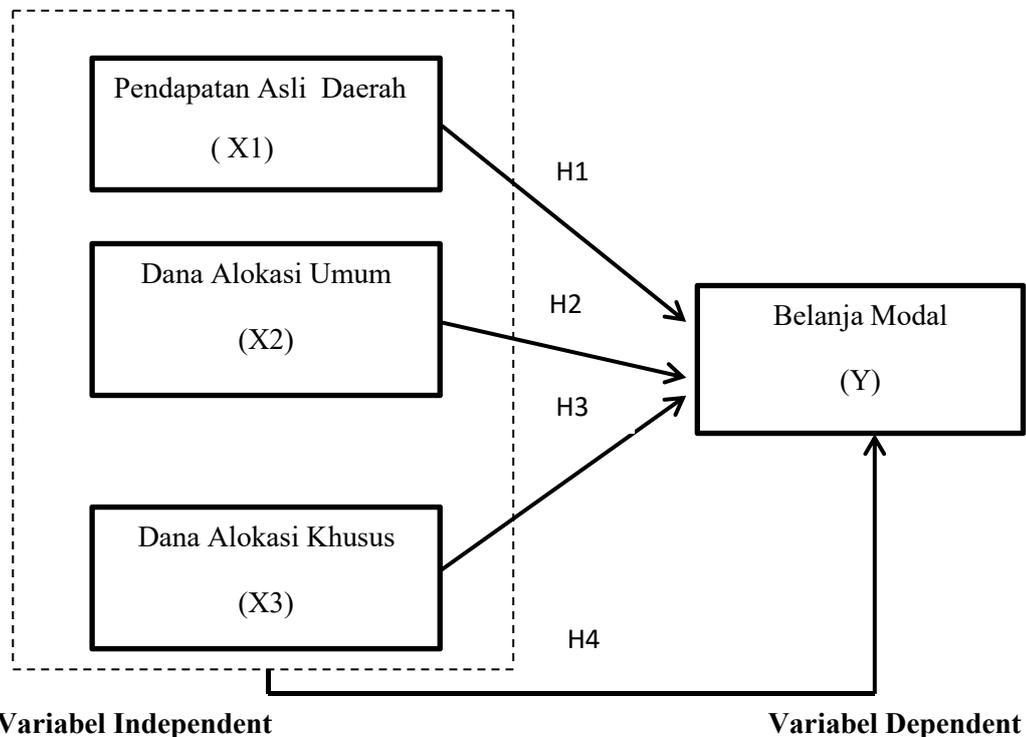
Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan public oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

#### **2.1.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung yang juga merupakan bagian dari Belanja Daerah dan didanai oleh Pendapatan Daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari Pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang Pengalokasiannya menekankan Aspek Pemerataan dan Keteradilan yang selaras dengan utusan Pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). dengan adanya Dana Perimbangan dari Pemerintah pusat tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan presentase Belanja Modal Daerahnya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2  
Kerangka Penelitian



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, Hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Parsial berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) Secara Parsial berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Parsial berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- H4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



### 3 METODE PENELITIAN

#### 3.1 *Rancangan Penelitian*

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kuantitatif, yaitu nilai pasti suatu data berbentuk angka yang bisa dihitung atau diukur dan data yang dapat diperoleh dengan perolehan nilai pasti. Penelitian Kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran Variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur Statistik. Selain itu pada Penelitian ini juga menggunakan desain Penelitian Kausal Komparatif. Nazir (2011:58) menyatakan Penelitian Komparatif adalah Penelitian Deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar sebab akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu Fenomena tertentu. Desain Kausal digunakan untuk mengukur kuat hubungan dan pengaruh antar Variabel dalam penelitian.

#### 3.2 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi penulis juga melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang diperlukan pada pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kepustakaan

Adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka dalam sebuah penelitian (Pasalong 2012:137). Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tentang Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 3.3 *Metode Analisis Data*

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti.

##### 3.3.1 *Analisis Statistik Deskriptif*

Variable dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga mean (M), Modus (Mo), dan standar Deviasi (SD).

##### 3.3.2 *Uji Asumsi Klasik*

###### 3.3.2.1 *Uji Normalitas*

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji apakah variabel dependen,



variabel independen atau keduanya dari sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

### **3.3.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

### **3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* (Nugroho, 2015: 62).

### **3.3.2.4 Uji Autokorelasi**

Menurut Supriyadi (2014:60) uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.

## **3.3.3 Uji Hipotesis**

Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

### **3.3.3.1 Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan (menjelaskan) antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel dependen (Sugiyono, 2012:275).

### **3.3.3.2 Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel Independen secara Parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel Dependen.

### **3.3.3.3 Uji Signifikan Stimultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau silmutan mempengaruhi variabel dependen.

### **3.3.3.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Koefisien Korelasi ( $R$ )**

Menurut (Ghazali, 2013: 97) Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel secara bersama. Sedangkan koefisien korelasi ( $R$ ) digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel variabel ini



#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### ***4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Secara Parsial***

Berdasarkan Hasil regresi Secara parsial memperoleh Hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial berpengaruh Positif dan Signifikan yang artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Belanja Modal Pemerintah Daerah juga dalam keadaan baik. yang besarnya Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan besar Pengaruhnya 76%, Hasil penelitian ini Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leni suzan (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan besar Pengaruhnya 83% , dengan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan berpengaruh yang positif dan Signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak baik terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Karena Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi Maka akan meningkat pula Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dimana Keuangan di Kabupaten Akan baik.

##### ***4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Secara Parsial***

Berdasarkan Hasil regresi secara Parsial memperoleh Hasil Bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besar pengaruhnya 60%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2011) yang membuktikan Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Besar Pengaruhnya 85%. Dari pernyataan diatas dapat kita analisa bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kuantan Singingi Mengalami Surplus Maka Keuangan Kabupaten Kuantan singingi akan baik, dan Belanja Modal akan meningkat.

##### ***4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Secara Parsial***

Berdasarkan Hasil regresi secara Parsial memperoleh Hasil Bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besar pengaruhnya 73% semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) yang membuktikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Besar Pengaruhnya 90%. Dari pernyataan diatas dapat kita analisa bahwa apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kuantan



Singingi Mengalami Surplus Maka Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi akan baik, dan Belanja Modal akan meningkat.

#### ***4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Secara Simultan***

Hasil Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara bersama sama berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin Tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maka Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan semakin meningkat, sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Maka Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Akan Semakin Menurun.

Pernyataan ini didukung oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Bandung Raya. Dalam Menyelenggarakan Pembangunan di daerahnya, faktor sumber Belanja Modal dan Pendapatan sangat menentukan terlaksananya Pembangunan Daerah itu sendiri.

## **5. KESIMPULAN**

Dari Hasil Pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besarnya Pengaruhnya sebesar 76%, yang artinya dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maka Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Akan Baik.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besar Pengaruhnya sebesar 60%, yang artinya dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kuantan Singingi maka akan mendorong pengeluaran yang besar juga didalam membiayai kegiatan .
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan besar Pengaruhnya sebesar 73%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kuantan Singingi dialokasikan untuk



membantu dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan serta kebutuhan yang bersifat khusus terhadap Belanja Modal.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Besar Pengaruhnya sebesar 90,2%, yang artinya Apabila pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kuantan Singingi Mengalami Peningkatan Maka Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Baik dan tidak Lagi kekurangan Dana atau mengalami defisit.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2019 Adapun penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam menyusun skripsi ini. Namun, berkat pertolongan dari Allah SWT dan dukungan dari keluarga serta pihak pihak yang telah membantu, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh Karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih terutama kepada Orang Tua peneliti dan keluarga yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, disamping itu peneliti juga mengucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I peneliti yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak M.Irwan, SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama peneliti menuntut ilmu disini hingga selesai.
6. Dinas BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai objek penelitian yang telah memberikan Data yang dibutuhkan bagi peneliti.
7. Orang Tuaku Ayahanda Rayulis dan Ibunda Roshayati tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka inginkan.



8. Untuk Abangku Seprialis, Kakak Iparku Ernida, Dan Kakak ku Dina Fitria, Abang iparku Verli Wibowo Dan Adekku Raihan Nabil yang telah ikut berpartisipasi dan selalu memberi motivasi dan inspirasi tanpa pamri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai selesai.
9. Untuk Teman Dekatku Azyumardi Azra Sebagai penyemangat dan Teman keluh kesah Saat penulis menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi selesai dengan baik. dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasinya selama ini, bahu membahu dan saling membantu satu sama lain terimakasih atas persahabatan kita selama ini, senda gurau yang sangat menghibur dikala bersama. Kampusku dan yang lainnya semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan pasti akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada negara, Bangsa dan Agama Khususnya Akuntansi Kelas A Angkatan 2017.

Akhir kata penulis mengucapkan Alhamdulillah. Semoga bantuan dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Abdullah, S., & Halim, A. 2014. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali*”. *Jurnal Ekonomi*,13 (2): 90-109.
- Bastian, I. 2014. *Akuntansi Sektor Publik* di Indonesia Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.Semarang.
- Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irianto, A. 2010. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, M. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2016 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir.Moh, PD. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Galia Indonesia

##### **Hasil Penelitian Terdahulu :**

- Prakosa, K.B. 2011. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan



- Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8 (2), 1410-2420.
- Purwanto, F.P.D. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Guritno, A. & Suzan, L. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013". *E-Proceeding of Management*, 2 (2): 2355-9357.
- Nugroho, Fajar. 2012. "Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Juliawati, Ebit, Darwanis. Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Tesis*. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
- Mutiaranisa. Estetika. 2012. "Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia". *Thesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Rachmah. Siti Nur. 2015. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)". Skripsi. UMS

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2000. *UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.